

EKONOMI PADI DI ASIA: SUATU TINJAUAN BERBASIS KAJIAN KOMPARATIF

Rice Economy In Asia: A Comparative Study-Based Review

Achmad Suryana¹ dan Ketut Kariyasa²

¹ Badan Litbang Pertanian, Jl. Ragunan 29, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12540

² Balai Besar Pengembangan dan Pengkajian Teknologi Pertanian, Jl. Tentara Pelajar No. 10, Bogor 16114

ABSTRACT

Especially for Asian regions, rice is a strategic commodity because it is a staple food for most of the Asian people. In terms of agricultural land resources availability, several countries have become importers whereas the others exporters. The result of economic study in Asia shows that Cambodia and Thailand have a better agricultural land resource availability to provide rice for their people than the other countries in Asia. The rice farming system is able to give a better life to rice farmers in Malaysia, but it is unable yet to Indonesian rice farmers because of their very small landholding size, even though they have applied intensive technology. Indonesian food autonomy (for rice) is better than that of several countries in Asia, such as Nepal, Japan, the Philippine and Malaysia.

Key words : *agricultural land availability, technology, rice, Asia*

ABSTRAK

Khususnya bagi kawasan Asia, beras merupakan komoditas strategis karena sebagian besar penduduknya menjadikan beras sebagai makanan pokok. Terkait dengan ketersediaan sumberdaya lahan pertanian untuk memproduksi beras, sebagian negara menjadi eksportir beras, sebagian lainnya masih harus impor. Hasil kajian komparatif ekonomi padi di Asia menunjukkan bahwa Kamboja dan Thailand memiliki daya dukung lahan pertanian dalam memproduksi beras untuk memenuhi kebutuhan penduduknya paling baik. Malaysia mampu menjadikan usahatani padi memberikan kehidupan yang layak bagi petaninya, sementara usahatani padi di Indonesia belum mampu memberikan kehidupan yang layak bagi petani, karena rata-rata luas garapan petani padi di Indonesia sangat sempit, sekalipun teknologi produksi padi yang diterapkan petani Indonesia sudah cukup intensif, dibawah China, Korea, Jepang, dan Vietnam. Tingkat kemandirian pangan beras Indonesia relatif lebih baik dibanding negara Nepal, Jepang, Filipina, dan Malaysia, namun masih lemah dibandingkan negara Asia lainnya.

Kata kunci : *daya dukung lahan, teknologi, padi, Asia*

PENDAHULUAN

Beras merupakan komoditas strategis bagi banyak negara, khususnya di kawasan Asia, karena sebagian besar penduduknya menjadikan beras sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, kemandirian pangan di wilayah Asia pada dasarnya dapat dicerminkan oleh kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pangan pokoknya, yaitu beras dari produksi sendiri. Bagi Indonesia berbagai kebijakan ekonomi di bidang perberasan selalu menjadi perhatian utama pemerintah, legislatif, dan masyarakat. Di sisi lain, penyediaan produksi beras domestik masih memiliki kendala, khususnya yang berkaitan dengan

semakin terbatasnya kapasitas produksi nasional yang disebabkan antara lain oleh (Suryana, 2002): (a) berlanjutnya konversi lahan pertanian ke nonpertanian, (b) menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan, (c) semakin terbatas dan tidak pastinya ketersediaan air irigasi untuk mendukung kegiatan usahatani padi akibat dari perubahan iklim mikro, (d) kurangnya pemeliharaan jaringan irigasi sehingga sekitar 30 persen di antaranya mengalami kerusakan, (e) semakin meningkatnya persaingan pemanfaatan sumberdaya air dengan sektor pemukiman dan industri, dan (f) semakin tidak pastinya perilaku iklim akibat perubahan global.

Sampai saat ini dan beberapa tahun ke depan, beras/padi masih dijadikan makanan pokok oleh penduduk Asia, sehingga ketergantungan penduduk Asia terhadap komoditas ini masih sangat besar. Dalam memenuhi kebutuhannya, beberapa negara Asia sudah dapat memenuhi permintaannya dari produksi sendiri, bahkan ada yang berlebih untuk diekspor. Sebaliknya beberapa negara Asia baru mampu memenuhi kebutuhan tersebut dari sebagian produksinya sendiri dan kekurangannya didatangkan dari pasar impor. Dari fakta ini timbul pertanyaan, kenapa fenomena itu bisa terjadi, padahal teknologi usahatani padi yang dihasilkan oleh IRRI (*International Rice Research Institute*) maupun oleh lembaga-lembaga penelitian padi nasional sudah banyak tersedia, dan akses terhadap teknologi tersebut terbuka luas? Apakah karena ada perbedaan dukungan sumberdaya lahan pertanian, khususnya lahan pertanian padi, atautkah karena ada perbedaan tingkat penerapan teknologi yang tercermin dari tingkat produktivitas? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dicoba dijawab dalam tulisan ini.

PERANAN DAN KARAKTERISTIK KOMODITAS BERAS

Beras merupakan komoditas unik tidak saja bagi Indonesia, tetapi juga bagi sebagian besar negara-negara Asia. Begitu pentingnya peranan beras terbukti jika terjadi ketidakstabilan persediaan pangan dan atau berfluktuasinya harga beras maka apabila hal ini tidak segera diantisipasi dapat memicu munculnya kerusuhan nasional yang mengarah pada tindak kriminal (Saliem, 2001). Kondisi yang sama juga diduga terjadi di negara lain Asia. Pengalaman tahun 1966 dan 1998 menunjukkan bahwa guncangan politik dapat berubah menjadi krisis ekonomi politik yang dasyat karena harga pangan melonjak tinggi dalam waktu yang singkat. Sebaliknya ketika ketersediaan pangan masih aman, seperti saat ini, maka masalah pangan tidak menjadi pendorong eskalasi kemelut politik. Namun demikian, sampai saat ini pun debat politik masih selalu muncul manakala harga beras melonjak tajam ataupun harga gabah turun tajam. Sebagian besar masyarakat masih tetap menghendaki adanya pasokan dan harga

beras yang stabil, tersedia sepanjang waktu, terdistribusi secara merata, dan dengan harga terjangkau (Sawit, 2001). Kondisi ini menunjukkan bahwa beras masih merupakan komoditas strategis secara politis.

Menurut Simatupang dan Rusastra (2004), walaupun sedikit menurun, beras masih tetap memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, karena: (a) beras masih merupakan makanan pokok penduduk sehingga sistem agribisnis beras berperan strategis dalam pemantapan ketahanan pangan, (b) sistem agribisnis beras mampu menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah yang sangat besar, karena sampai saat ini usahatani padi masih dominan dalam sektor pertanian, dan (c) sistem agribisnis beras sangat instrumental dalam upaya pengentasan kemiskinan, karena kebanyakan penduduk miskin ada pada usahatani padi.

Isu pentingnya peranan beras muncul kembali, dimana sejak kuartal kedua tahun ini (2008) dunia dihadapkan pada masalah krisis pangan beras, karena harga beras dunia meningkat secara tajam. Harga beras di pasar dunia mencapai US\$ 1000 per ton, padahal pada kondisi normal hanya berkisar US\$ 180 – US\$ 300 per ton. Kondisi ini telah memicu terjadinya demonstrasi dan kerusuhan terutama di negara-negara yang mengalami krisis pangan beras. Untungnya pada waktu yang sama produksi beras Indonesia cukup normal, sehingga krisis pangan dunia tidak begitu berdampak bagi Indonesia dari sisi pasokan. Namun demikian, krisis pangan ini diperkirakan akan berdampak terhadap naiknya harga beras di pasar domestik seiring dengan naiknya harga BBM.

Terkait dengan adanya krisis pangan beras, hasil pertemuan tingkat menteri sepuluh negara Asian (*Asian Economic Minister's Retreat*) di Nusa Dua Bali, tanggal 3 Mei 2008 (Kompas, 4 Mei 2008) menghasilkan empat butir kesepakatan, yaitu *pertama*, tingginya harga beras karena disebabkan karena: tingginya permintaan, naiknya ongkos produksi seiring dengan meningkatnya harga BBM, kurangnya lahan pertanian, dan gangguan temporer seperti cuaca dan hama penyakit. Tiga butir kesepakatan lainnya adalah bahwa upaya menjaga suplai pangan beserta harganya merupakan hal yang fundamental, perlu tindakan nyata dalam meningkatkan

produktivitas pangan, dan diperlukan sistem perdagangan yang adil dan upaya untuk mencapai perdagangan bahan pangan yang lebih teratur.

Lebih lanjut, Program Pangan Dunia, *World Food Program* (Kompas 26 April 2008) melaporkan bahwa dampak kenaikan harga beras berbeda antar negara. Sebagian besar dampak ini menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk yang kelaparan. Di Asia, yaitu Filipina, Indonesia, dan Bangladesh (tiga importir dengan jutaan rakyat miskin) banyak orang mengurangi makan. Di negara kaya, seperti Korea dan Singapura, banyak yang dapat menerima kenaikan harga pangan tanpa mengurangi anggaran keluarga. Di Jepang, sebagian orang menggiatkan menanam beras di halaman rumahnya dan kebijakan pemerintah Jepang membuat harga relatif stabil.

Menurut Pambudy *et al.* (2002) ada beberapa karakteristik yang menarik dari beras yaitu: (a) 90 persen produksi dan konsumsi beras dilakukan di Asia, hal ini berbeda dengan jenis tanaman lainnya, (b) pasar beras dunia sangat tipis, yaitu hanya sekitar 4 - 5 persen dari total produksi dunia, (c) harga beras sangat tidak stabil apabila dibandingkan dengan komoditas pangan lainnya, (d) 80 persen perdagangan beras dunia dikuasai oleh enam negara yaitu Thailand, Amerika Serikat, Vietnam, Pakistan, Cina dan Myanmar, sehingga pasar lebih mengarah kepada kekuatan oligopoli, (e) Indonesia merupakan negara *net importir*, sehingga kinerja upaya pemenuhan kebutuhan pangan beras dipengaruhi kinerja pasar impor, dan (f) di sebagian besar negara di Asia, beras umumnya diperlakukan sebagai *wage goods* dan *political goods*, sehingga pemerintah akan lebih labil apabila harga beras tidak stabil dan sulit diperoleh.

Bagi Indonesia karakteristik beras tersebut di atas ditambah dengan adanya kendala utama di sisi produksi yaitu sempitnya skala usaha yang dikelola petani. Menurut Suryana *et al.* (2001) setidaknya ada empat ciri utama yang berkaitan dengan hal ini yaitu: rata-rata luas garapan petani padi hanya sebesar 0,3 hektar, sekitar 70 persen petani (khususnya buruh tani dan petani skala kecil) termasuk golongan masyarakat miskin, sekitar 60 persen petani padi adalah *net consumer* beras, dan pendapatan rata-rata petani dari

usahatani padi hanya sekitar 30 persen dari total pendapatan keluarganya. Disamping itu konsumsi beras per kapita penduduk Indonesia masih tergolong tinggi, dimana pada tahun 2006 masih sekitar 139 kg/kapita/tahun (Suryana, 2007a).

DAYA DUKUNG SUMBERDAYA LAHAN

Salah satu kelemahan dalam pemahaman pangan adalah bahwa pendekatannya sering kali hanya dikaitkan dengan ketersediaan beras saja, padahal seharusnya dilihat pula dalam konteks ketersediaan pangan dalam arti luas (beras, jagung, kedelai, kacang tanah, singkong, sayur-sayuran, buah-buahan, daging, telur, dan lain sebagainya). Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada bagian ini tidak hanya dilihat daya dukung lahan pertanian (luas lahan sawah) dalam memproduksi beras saja, tetapi juga daya dukung lahan pertanian dalam penyediaan pangan dalam arti luas. Gambaran umum daya dukung sumberdaya lahan pertanian yang dimiliki oleh negara-negara Asia untuk memproduksi beras maupun pangan dalam arti luas adalah sebagai berikut.

Dalam kurun waktu 2005-2006, rata-rata rasio luas lahan pertanian untuk memproduksi pangan terhadap penduduk desa di antara negara-negara Asia cukup beragam, dengan rata-rata 0,25 ha per orang (Lampiran 1). Sebanyak lima negara memiliki rasio luas lahan pertanian terhadap penduduk desa di atas rata-rata, sebaliknya sebanyak sepuluh negara memiliki rasio dibawah rata-rata. Rasio terbesar terdapat di Korea, yaitu 0,54 ha per orang disusul Malaysia dan Thailand berturut-turut 0,52 ha dan 0,47 ha per orang. Sementara rasio luas lahan pertanian Indonesia dengan jumlah penduduk desanya menempati urutan ke 4 dari 15 negara Asia, yaitu sebesar 0,40 ha per orang. Sebaliknya rasio terkecil terdapat di Myanmar, yaitu 0,01 ha per orang. Rasio terkecil berikutnya terdapat di Jepang dan Sri Lanka, berturut-turut 0,07 dan 0,12 ha per orang.

Dari gambaran ini menunjukkan bahwa negara-negara Korea, Malaysia, dan Thailand mempunyai daya dukung lahan pertanian yang paling kuat untuk menyediakan pangan (memberikan makan) bagi penduduk

yang bertempat tinggal di pedesaan, sebaliknya Myanmar memiliki daya dukung lahan pertanian paling rendah di antara negara-negara Asia dalam hal menyediakan pangan bagi masyarakat desanya. Indonesia termasuk negara yang mempunyai daya dukung lahan pertanian yang baik. Dengan melihat dari ketersediaan daya dukung ini menunjukkan bahwa jika lahan pertanian tersebut dikelola secara baik sebagai kegiatan untuk menghasilkan komoditas pertanian (padi, jagung, kedelai, kacang tanah, singkong, sayur-sayuran, buah-buahan, daging, telur, dan lain lain), pada dasarnya Indonesia mempunyai kemampuan untuk menyediakan pangan kepada penduduk desa secara memadai dibandingkan dengan kebanyakan negara-negara lainnya di Asia.

Bagaimana kalau daya dukung lahan pertanian itu dilihat tidak hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan penduduk desa, tapi terhadap penduduk keseluruhan? Nampak bahwa, rata-rata daya dukung lahan pertanian terhadap penduduk secara keseluruhan di masing-masing negara Asia sekitar 0,13 ha per orang (Lampiran 1). Thailand mempunyai daya dukung lahan pertanian terhadap penduduk secara keseluruhan paling baik dibandingkan negara-negara di Asia lainnya, yaitu 0,32 ha per orang, disusul Indonesia sebesar 0,24 ha per orang, dan Kamboja dan Malaysia yaitu 0,19 ha per orang. Pakistan dan Philipina juga yang mempunyai daya dukung lahan pertanian terhadap penduduk secara keseluruhan di atas rata-rata negara Asia. Myanmar merupakan negara Asia yang memiliki daya dukung lahan pertanian paling rendah, yaitu hanya 0,01 ha per orang, disusul Jepang, Korea dan Sri Lanka berturut-turut 0,03 ha; 0,04; dan 0,08 ha per orang. Banglades, Vietnam, India, dan Nepal memiliki daya dukung lahan pertanian berkisar 0,10 – 0,13 ha per orang dan masih dibawah rata-rata negara-negara Asia.

Dari keragaan daya dukung lahan pertanian terhadap penduduk secara keseluruhan di atas menunjukkan bahwa Jepang bukan lagi merupakan negara terkuat dalam menyediakan pangan terhadap penduduknya secara keseluruhan, karena posisinya bahkan berada nomor dua dari yang terlemah. Hal ini terjadi karena sebagian besar penduduk Jepang bertempat tinggal di wilayah perkota-

an. Thailand dan Indonesia merupakan negara paling kuat memiliki daya dukung lahan pertanian dalam penyediaan pangan dalam arti luas bagi penduduknya secara keseluruhan. Posisi daya dukung lahan pertanian Thailand dan Indonesia dalam memberikan makan kepada penduduk desa dan penduduk secara keseluruhan tidak banyak berubah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada kedua negara ini sebagian besar penduduknya berada di wilayah pedesaan. Dengan demikian, sama halnya dengan Thailand, pada dasarnya Indonesia mempunyai komparatif ekonomi lebih baik dibandingkan negara-negara lainnya dalam memproduksi pangan.

Keragaan daya dukung lahan pertanian dalam menyediakan pangan yang dibahas di atas lebih kepada penyediaan pangan dalam arti luas, tidak terbatas pada beras saja. Mengingat sampai saat ini dan bahkan beberapa tahun ke depan bagi negara-negara Asia beras masih dijadikan pangan pokok, sehingga menarik untuk mengetahui lebih jauh secara spesifik kemampuan daya dukung lahan pertanian dari masing-masing negara Asia dalam menyediakan beras bagi penduduknya. Pada tingkat produktivitas yang relatif sama, rasio luas lahan pertanian padi (luas lahan pertanaman padi) terhadap penduduk secara keseluruhan dapat dipakai sebagai indikator kemampuan daya dukung sumberdaya lahan pertanian dalam menyediakan pangan beras bagi penduduknya. Semakin besar rasio ini, maka dapat dikatakan semakin kuat daya dukung sumberdaya lahan pertanian dalam penyediaan padi/beras terhadap warganya, demikian sebaliknya.

Selama tahun 2005-2006, rata-rata rasio lahan pertanian padi terhadap penduduk di Asia sebesar 0,055 ha per orang (Lampiran 1). Daya dukung lahan pertanian padi di Kamboja dalam menyediakan padi/beras bagi penduduknya hampir 85 kali dibanding Myanmar yang paling lemah, yaitu 0,17 ha per orang berbanding 0,002 ha per orang. Thailand memiliki daya dukung yang terbesar kedua untuk kawasan Asia, yaitu sekitar 78 kali dibanding Myanmar. Daya dukung lahan pertanian padi di Indonesia menduduki urutan ke enam, dan sedikit dibawah rata-rata Asia, yaitu 0,051 ha per orang. Dari gambaran ini menunjukkan bahwa Kamboja dan Thailand memiliki komparatif ekonomi paling baik di

antara negara-negara Asia dalam penyediaan beras bagi penduduknya. Sementara itu, Indonesia kurang memiliki komparatif ekonomi dalam penyediaan beras, karena daya dukung lahan pertanian padi terhadap penduduknya hanya sebesar 30 persen dari daya dukung lahan pertanian padi Kamboja.

Rasio antara lahan pertanian padi dan jumlah petani padi dapat dipakai sebagai indikator kemampuan usahatani padi untuk memberikan kehidupan yang layak bagi rumah tangga petani padi. Semakin tinggi rasionya menunjukkan usahatani padi mampu memberikan kehidupan yang semakin layak bagi rumah tangga petani padi, begitu sebaliknya jika rasio tersebut menurun. Dari data selama tahun 2005-2006 menunjukkan bahwa luas lahan pertanian padi per petani antar negara Asia cukup beragam, dengan rata-rata 0,94 ha per petani (Lampiran1). Luas terbesar terdapat di Malaysia, yaitu 4,28 ha per petani, disusul petani di Philipina, Pakistan, dan Jepang berturut-turut 2,08 ha; 1,62 ha; dan 1,6 ha per petani, sementara untuk negara lainnya kurang dari 0,65 ha per petani.

Luas lahan pertanian padi per petani padi di Indonesia termasuk sempit (0,13 ha/petani), hanya sedikit lebih luas dari dua negara Asia lainnya, yaitu Sri Lanka dan Myanmar yang masing-masing 0,09 ha dan 0,04 ha per petani. Kondisi ini menunjukkan bahwa petani di Malaysia dan Philipina dengan mengandalkan pendapatan hanya dari usahatani padi sudah bisa hidup secara layak, sebaliknya untuk petani padi di Indonesia, termasuk juga petani di Sri Lanka dan Myanmar; belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya jika satu-satunya sumber pendapatannya berasal dari usahatani padi. Luas garapan lahan padi per petani di Malaysia paling tinggi karena jumlah petani padi sangat sedikit walaupun pertanaman padi di negara ini juga tidak luas. Pada dasarnya Indonesia berpeluang untuk meningkatkan luas garapan petani padi, seperti melalui pembukaan lahan sawah baru tanpa menambah jumlah petani atau mengurangi jumlah petani melalui penyediaan lapangan kerja di luar sektor pertanian, agar kegiatan usahatani padi tidak hanya menarik tapi mampu menghidupi rumah tangga petani secara layak. Namun untuk mewujudkan upaya tersebut perlu dilakukan secara serius

serta kerjasama dan komunikasi yang lebih baik lagi mulai dari tingkat pengambil kebijakan sampai tingkat pelaksana di lapangan.

PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS PADI

Jumlah produksi padi dari 15 anggota negara Asia pada periode 2005-2006 mencapai 549,4 juta ton per tahun (Lampiran 1). China merupakan negara produsen utama padi/beras di Asia, dimana sebanyak 32,9 persen di produksi di China. Produsen padi utama kedua adalah India, dengan pangsa sekitar 25,5 persen. Indonesia menduduki urutan ketiga dengan pangsa produksi sekitar 9,9 persen, disusul Vietnam, Myanmar, Thailand, dan Banglades dengan pangsa produksi berkisar 4,9 - 6,6 persen. Negara yang tidak banyak menghasilkan padi di Asia adalah Malaysia dengan pangsa produksi hanya 0,3 persen, disusul Sri Lanka, Nepal, Korea dengan pangsa berturut-turut 0,61 persen; 0,77 persen, dan 0,91 persen.

Dalam dua tahun terakhir (2005-2006), rata-rata produktivitas padi di negara-negara Asia baru mencapai 3,8 ton per ha. Produktivitas padi tertinggi mampu dihasilkan oleh petani di China, yaitu 6,3 ton per ha, disusul petani di Korea, Jepang, dan Vietnam masing-masing 4,3 ton; 5,1 ton; dan 4,9 ton per ha. Tingkat produktivitas yang mampu dihasilkan petani padi di Indonesia termasuk sudah baik dan menduduki urutan ke lima, yaitu 4,6 ton per ha. Produktivitas padi paling rendah dihasilkan oleh petani-petani di Pakistan, yaitu baru 2,2 ton per ha.

Pengalaman menunjukkan bahwa tingkat produktivitas padi berbanding lurus dengan luas lahan sawah irigasi. Pada lahan irigasi petani bisa menerapkan teknologi lebih intensif dibanding pada lahan lainnya (sawah tadah hujan, lahan kering, pasang surut). Dengan demikian, perbedaan tingkat produktivitas padi di negara-negara Asia terjadi karena adanya keragaman luas lahan sawah irigasi relatif terhadap total luas pertanaman padi. Keragaman ini juga secara tidak langsung dapat mencerminkan adanya keragaman tingkat penerapan teknologi usahatani padi pada masing-masing negara Asia.

Penerapan teknologi usahatani padi di China, Korea, dan Jepang lebih maju diban-

ding negara-negara Asia lainnya. Penerapan teknologi usahatani padi yang sudah maju di tiga negara tersebut karena didukung ketersediaan lahan sawah irigasi yang relatif luas. Luas lahan sawah irigasi untuk kegiatan produksi padi di China, Korea, dan Jepang berturut-turut 93,0 persen; 99,9 persen; dan 88,0 persen dari total luas pertanaman padi yang ada. Bahkan di China sekitar 50 persen dari luas pertanaman padi sudah menggunakan benih hibrida yang memerlukan pengelolaan secara intensif dan didukung dengan sistem pengairan secara baik. Tingkat penerapan teknologi usahatani padi di Vietnam juga termasuk sudah intensif, karena sebanyak 61,8 persen kegiatan usahatani dilakukan di lahan irigasi, terutama di Delta Mekong.

Penerapan teknologi usahatani padi di Indonesia sudah baik, menduduki urutan ke 5, karena Indonesia memiliki luas lahan irigasi sekitar 71,4 persen dari total luas pertanaman padi. Kegiatan usahatani padi pada lahan sawah irigasi di Indonesia banyak dilakukan di Jawa dan Bali. Kasryno *et al.* (2004) menginformasikan bahwa pangsa lahan irigasi di kedua lokasi tersebut pada tahun 2000 mencapai 83 persen dan 77 persen. Sedangkan tingkat penerapan teknologi usahatani padi paling rendah dilakukan oleh petani-petani di Pakistan, sekalipun semua kegiatan usahatani padi di negara ini dilakukan pada lahan sawah irigasi. Beberapa hal yang menyebabkan masih rendahnya produktivitas usahatani padi di Pakistan dibandingkan negara-negara Asia lainnya adalah karena: ketersediaan benih berkualitas sangat terbatas sehingga banyak petani yang menggunakan benih padi kurang bagus, ketersediaan unsur hara lahan sekalipun pada lahan sawah irigasi rendah dan disisi lain tidak diimbangi dengan penggunaan input produksi terutama pupuk secara intensif (sesuai kebutuhan tanaman padi), dan belum berkembangnya infrastruktur irigasi sehingga sering terjadi kelangkaan air.

PERDAGANGAN BERAS

Secara agregat, Asia mengalami surplus dalam perdagangan beras di pasar dunia. Pada dua tahun terakhir (2005-2006), rata-rata ekspor beras dari negara-negara Asia mencapai 20,9 juta ton per tahun, dan pada waktu

yang sama jumlah impor beras ke negara-negara Asia sekitar 6,3 juta ton, sehingga Asia mengalami surplus dalam perdagangan beras di pasar dunia sekitar 14,6 juta ton per tahun (Lampiran 2). Surplus ini diperkirakan semakin besar, jika negara-negara Asia terus berupaya meningkatkan pengelolaan usahatani padi baik secara intensif maupun ekstensif serta melakukan diversifikasi konsumsi pangan terutama pada negara-negara yang tingkat konsumsi beras per kapitanya masih tinggi.

Ada tujuh negara Asia yang mengalami surplus perdagangan beras, dengan urutan surplus dari terbesar yaitu Thailand, Vietnam, India, Pakistan, China, Myanmar, dan Sri Lanka. Tujuh negara lainnya, termasuk Indonesia mengalami defisit dalam perdagangan beras. Kamboja sebenarnya mengalami surplus dalam perdagangan beras, akan tetapi datanya tidak tercatat dengan baik, karena keluarnya beras dari Kamboja banyak yang dilakukan melalui daerah perbatasan yang tidak resmi.

Negara eksportir utama beras di Asia adalah Thailand. Selama tahun 2005-2006, dari 20,9 juta ton beras yang diekspor dari negara-negara Asia, sebanyak 35,5 persen berasal dari negara ini. Eksportir terbesar kedua berikutnya adalah Vietnam dengan pangsa 22,9 persen, disusul India dan Pakistan masing-masing 19,5 persen dan 17,7 persen. Dari keempat negara tersebut pangsa eksportnya sudah mencakup 95,6 persen.

Seperti disebutkan sebelumnya, walaupun Asia surplus dalam perdagangan beras, namun beberapa negara Asia selain sebagai eksportir juga sekaligus sebagai importir, dan ada juga yang murni importir karena belum mampu memenuhi kebutuhan beras domestiknya secara baik. Rata-rata impor beras dari negara-negara Asia dalam dua tahun terakhir (2005-2006) sebesar 6,3 juta ton per tahun. Negara importir utama beras adalah Indonesia dengan pangsa impor sebesar 30,3 persen dari total impor beras Asia. Importir terbesar berikutnya adalah Philipina dengan pangsa 27,5 persen, lalu Jepang sebesar 9,7 persen, serta Banglades, Malaysia, dan China dengan total impor hampir sama yaitu sekitar 8,2-8,5 persen.

Seperti diungkap sebelumnya bahwa beras masih merupakan pangan pokok bagi penduduk Negara-negara Asia. Dalam kondisi

ini, rasio antara jumlah impor beras dan jumlah produksi beras domestik dari masing-masing negara Asia relevan dipakai sebagai indikator kemandirian pangan pada masing-masing negara Asia. Semakin tinggi rasionya menunjukkan bahwa kemandirian pangan suatu negara semakin rendah. Suatu negara dikatakan mempunyai kemandirian pangan secara absolut atau swasembada beras secara penuh jika rasio bernilai nol. Pada kondisi ini kebutuhan beras masyarakat seluruhnya dipenuhi dari produksi dalam negeri tanpa ada impor.

Dengan berpegang pada pemahaman di atas, terlihat bahwa ada enam negara Asia, yaitu Kamboja, India, Korea, Myanmar, Pakistan dan Thailand yang mempunyai kemandirian pangan cukup kuat (Lampiran 2). Semua kebutuhan pangan beras domestiknya dipenuhi dari produksi sendiri. Kemandirian pangan beras relatif paling lemah di Asia adalah Malaysia. Jumlah Impor beras Malaysia mencapai 36 persen terhadap produksi beras domestiknya. Tingkat kemandirian pangan beras Indonesia relatif lebih baik dibanding Nepal, Jepang, Philipina, dan Malaysia, sekalipun Indonesia merupakan pengimpor utama beras di Asia. Impor beras Indonesia hanya sebanyak 3,5 persen terhadap produksi domestik, sementara jumlah impor beras negara Nepal, Jepang, dan Philipina berkisar 3,8-11,3 persen dari masing-masing produksi domestiknya.

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN BERAS DI ASIA

Berbagai langkah dan kebijakan diterapkan masing-masing negara di Asia dalam upaya meningkatkan produksi berasnya baik untuk tujuan memenuhi kebutuhan dalam negeri, meningkatkan ekspor, maupun mengurangi impor. Berikut adalah gambaran secara umum kebijakan pengembangan beras di beberapa negara Asia.

China

Negara ini merupakan negara produsen dan konsumen beras terbesar di dunia. Namun demikian, berkat usaha yang serius, pemerintah China mampu memenuhi kebu-

tuhan masyarakatnya secara baik. Beberapa hal yang perlu dicatat berkaitan dengan keberhasilan China dalam mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh adalah (Kustia, 2002): *Pertama*, sistem kebijakan pangan yang rasional, obyektif dan fokus serta dikoordinasikan dengan baik oleh Dewan Negara (Kabinet) dengan ujung tombaknya *The State Development Planning Commission* (SDPC) yang menata berbagai kementerian, lembaga nasional terkait guna mencapai tujuan produksi, sistem perdagangan/pemasaran dan harga melalui mekanisme yang ada untuk mencapai kestabilan ketahanan pangan nasionalnya. *Kedua*, kebijakan industri pedesaan yang dilakukan China sejak tahun 1980-an telah berhasil mengalihprofesikan 100 juta jiwa petani untuk bekerja pada sektor industri pedesaan. *Ketiga*, dukungan yang kuat dari lembaga-lembaga penelitian dari berbagai perguruan tinggi yang selalu meningkatkan usahanya untuk mencapai hasil yang maksimal dan berusaha membimbing petani dan perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pertanian, baik melalui bimbingan penyuluhan maupun percontohan yang konkrit dan berhasil guna. *Keempat*, bantuan dan kerja sama teknik luar negeri dan badan-badan pangan dunia dimanfaatkan secara maksimal, fokus, rasional, dan berhasil guna. Khusus untuk menjaga kestabilan pasar, pemerintah China menetapkan quota impor beras yang rata-rata 200 ribu ton/tahun dengan kualitas tinggi (*long grain*) dan dikenakan biaya masuk impor berkisar 1-9 persen, sedangkan beras impor diluar quota impor dikenakan bea masuk impor sebesar 180 persen dari harga impornya. Dalam upaya meningkatkan produksi beras dalam negeri, pemerintah China juga menyediakan sarana dan infrastruktur pertanian, seperti membangun sistem pengairan secara baik. Perbaikan penerapan teknologi produksi padi terus dilakukan, misalnya mendorong petani menggunakan benih hibrida. Sampai saat ini sekitar 50 persen petani di China sudah menggunakan benih hibrida.

Philipina

Keberhasilan dalam meningkatkan produksi padi seringkali menjadi tolak ukur keberhasilan dari pemerintahan yang berkuasa di Philipina (Soeratmin, 2002). Oleh karena itu,

program pencapaian swasembada beras telah dijadikan sebagai tujuan utama dalam kebijakan pemerintahan Philipina dari tahun ke tahun. Upaya peningkatan produksi beras terus dilakukan, dimana pembangunan bendungan dan saluran irigasi menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda nasional pemerintahan Philipina saat ini. Pada tahun 2001, pemerintah telah mengalokasikan dana sekitar US\$ 92,5 juta yang digunakan untuk pembangunan proyek-proyek irigasi untuk mengairi sekitar 17 ribu hektar sawah tadah hujan. Pemerintah Philipina juga sedang menggalakan penggunaan padi hibrida. Agar petani dapat menggunakan bibit unggul dan input lainnya sesuai kebutuhan, pemerintah Philipina dengan mengalokasikan dana sebesar US\$ 8,8 juta. Petani yang terlibat dalam program padi hibrida mendapat bantuan kredit sebesar US\$ 196 per hektar dari *Land Bank* yang disalurkan melalui Perusahaan Perkreditan Pedesaan Quedan (*Quedan Rural Credit Quarantee Corporation*). Kebijakan insentif berproduksi diberikan langsung ke petani dan Asosiasi yang terakreditasi melalui *Cooperative Development Incentive Fee* (CDIF) dan *Emergency Assistance Pay* (EAP). Bantuan langsung pemerintah ke petani dan asosiasi dalam bentuk *support price* untuk musim panen Maret-Agustus sebesar US\$ 0,20 per kg dan musim panen September-Februari sebesar US\$ 0,18 per kg. Selain itu, petani dan asosiasi juga mendapat insentif pengeringan dan pengangkutan masing-masing US\$ 0,0029 dan US\$ 0,0019 per kg. Untuk melindungi petani, pemerintah mengenakan tarif impor sebesar 50 persen dibawah *Minimum Access Volume* (MAV). Sedangkan impor beras yang dilakukan oleh *National Food Authority* (NFA) yang ditunjuk langsung oleh pemerintah tidak dikenakan tarif.

India

Pemerintah India secara konsisten mengupayakan peningkatan kesejahteraan petani dan mendorong mereka untuk meningkatkan kesejahteraan melalui berbagai kebijakan (Soemintaatmadja, 2002). Kebijakan peningkatan produktivitas beras yang utama dilakukan adalah pemberian subsidi pupuk, bahan bakar dan pembelian alat pertanian. Khusus untuk pembelian alat pertanian, pemerintah India memberikan harga konsensi

kredit murah melalui sektor perbankan. Subsidi pupuk yang diberikan pemerintah untuk sektor pertanian secara konsisten meningkat. Selanjutnya untuk membantu petani mendapatkan akses lebih baik terhadap berbagai input usahatani, negara-negara bagian di India membentuk *The State Agro Industries Corporation* (SAIC). Saat ini peran SAIC lebih diperluas lagi untuk membantu pemasaran produksi, menyediakan alat dan mesin pertanian, promosi, *manufacturing*, pembangunan industri agribisnis dan menjalankan program-program pelatihan kepada petani. India juga menetapkan kebijakan di bidang pengolahan hasil pertanian dibawah koordinasi Operasi Pasca Panen (*Post Harvest Operation*) dan berkerjasama dengan beberapa institusi seperti: *Save Grain Campaign* (SGC), *Indian Grain Management and Research Institute* (IGMRI) dan *Central Grain Analysis and Laboratory* (CGAL). Dukungan pemerintah tidak hanya sebatas pada subsidi input, tetapi juga dalam bentuk kebijakan harga output melalui *minimum support price* (MSP) yang diumumkan setiap tahun setelah mendapat rekomendasi dari *Commission for Agricultural Cost and Prices* (CACP). Ada beberapa hal yang diperhatikan oleh CACP dalam merekomendasikan perubahan MSP, yaitu: biaya produksi, harga input, rasio harga input dengan output, perkembangan harga pasar, keseimbangan harga antar komoditas pangan, perkembangan penawaran dan permintaan beras, dampak struktur biaya industri (upah tenaga kerja), laju inflasi, dan keseimbangan nilai tukar petani. Untuk melindungi konsumen, India juga menerapkan kebijakan *Central Issue Prices* (CIP), dimana harga beras domestik antara masyarakat miskin dan tidak miskin dibedakan. Untuk mendorong ekspor, India menetapkan kebijakan subsidi ekspor.

Kamboja

Dalam kurun waktu 1950-1960, beras merupakan sumber penghasil devisa penting bagi Kamboja (Nasution, 2002). Namun, prestasi tersebut hilang karena terjadi perang saudara kurang lebih dua dasawarsa yang mengakibatkan hancurnya sarana dan prasarana pertanian. Dampaknya, Kamboja menjadi negara net importir beras. Walaupun dengan sarana dan prasarana pertanian yang terbatas, dengan usaha dan kerja keras

akhirnya sejak tahun 1996 Kamboja mengalami surplus beras secara nasional dan kondisi ini membuat harga domestik menjadi tertekan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Kamboja akhirnya membuat kebijakan perdagangan dengan menghilangkan semua hambatan ekspor. Dalam upaya tetap menjaga ketahanan pangan nasional, eksportir beras harus mendapat ijin dari pemerintah untuk dapat mengekspor beras ke luar Kamboja. Keterbatasan anggaran menjadi alasan utama Kamboja tidak menerapkan kebijakan yang dapat membantu petani padi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Untuk melindungi petani, satu-satunya kebijakan yang diterapkan pemerintah Kamboja adalah lisensi impor, yang dibedakan impor untuk bantuan pangan dan untuk perdagangan secara komersial. Pemerintah menetapkan pajak sebesar 7 persen bea pabean dan 10 persen PPN untuk impor beras komersial dan membebaskan pajak impor beras untuk bantuan pangan.

Laos

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Laos dalam meningkatkan produksi berasnya, seperti perluasan areal tanam disertai dengan pembangunan jaringan irigasi, penggunaan varietas unggul, penggunaan pupuk non organik, teknik penanaman yang baru, dan penggunaan obat-obatan pemberantasan hama penyakit tanaman (Razif, 2002). Dukungan pemerintah dalam meningkatkan produksi beras lebih terfokus pada perbaikan sarana irigasi berupa sekitar 22.240 unit prasarana yang terdiri dari 170 waduk, 680 bangunan saluran irigasi, 3.176 stasiun pompa dan 18.150 bangunan saluran dasar, yang semuanya itu mampu mengairi sawah 280.000 ha sawah pada musim hujan dan 197.130 ha pada musim kemarau. Pemerintah belum menerapkan kebijakan ekspor-impor secara spesifik, karena Pemerintah Laos menghadapi kendala utama, yaitu panjangnya daerah perbatasan dengan kondisi yang masih sangat rawan terjadinya penyelundupan.

Myanmar

Untuk mendukung peningkatan produksi beras secara berkelanjutan, Pemerintah Myanmar telah menetapkan lima strategi dasar pembangunan pertanian (Koro, 2002), yaitu:

membuka dan mengembangkan lahan baru, pembangunan saluran irigasi, memberikan dukungan terhadap mekanisasi pertanian, menerapkan teknologi pertanian yang modern, dan penggunaan bibit unggul. Untuk mendorong surplus produksi beras yang lebih banyak lagi, Pemerintah Myanmar memberikan kebebasan petani memilih jenis padi yang akan ditanam, disamping juga memberi perlindungan terhadap hak-hak petani. Jenis subsidi input yang diberikan pemerintah meliputi: bibit unggul, pupuk, pestisida, kredit usahatani, dan kredit untuk pembelian alat-alat pertanian. Pemerintah Myanmar juga mengendalikan harga padi/beras melalui pembelian dan pengumpulan padi secara langsung dari petani. Pemerintah juga menyediakan tempat penggilingan dan penyimpanan padi. Pemerintah Myanmar melalui *Myanmar Agriculture Produce Trading (MAPT)* yang berada dibawah koordinasi Kementerian Perdagangan mengendalikan kebijakan perdagangan beras.

Thailand

Thailand merupakan salah satu negara Asia yang masih mengandalkan perolehan devisanya dari sektor pertanian. Secara umum ada dua kebijakan perberasan yang diterapkan secara konsisten oleh pemerintah Thailand, yaitu kebijakan umum dan khusus (Utomo, 2002). Kebijakan umum yang dibuat pemerintah Thailand antara lain: pendirian pusat penelitian, pembentukan *Public Warehouse Organization (PWO)*, dan pembentukan *Marketing Organization for Farmers (MOF)*. Pendirian Pusat Penelitian dimaksudkan untuk mengembangkan varietas unggul baru yang dapat disesuaikan dengan berbagai ekosistem. Kegiatan PWO yang khusus berkaitan dengan beras adalah: (a) menerima titipan atau membeli beras dari para petani, koperasi pertanian, pedagang beras, dan penggilingan padi dengan harga sesuai dengan harga dasar yang telah ditetapkan *Rice Committee*, (b) menyimpan kelebihan persediaan beras pada musim panen untuk menghindari rendahnya harga beras, dan (c) mengintervensi pasar melalui pembelian dan penyimpanan beras untuk didistribusikan terutama ke masyarakat berpendapatan rendah dengan harga yang wajar. Khusus untuk kegiatan penitipan beras, PWO memberikan kesempatan kepada petani untuk mengambil kembali beras mereka pada

saat harga di pasaran tinggi. Kebijakan khusus yang menarik untuk disampaikan adalah *Paddy Mortgage* (pegadaian padi), disamping kebijakan perdagangan internasional. Dalam skema *paddy mortgage* yang dilaksanakan oleh *Bank of Agriculture and Cooperation*, para petani akan memperoleh pinjaman dengan tingkat kredit yang preferential sampai 90 persen dari nilai padi yang digadaikan. Mulai tahun 1999, pemerintah Thailand telah memperlonggar skema gadai tersebut dengan membolehkan petani untuk menyampaikan beras (disamping padi) sebagai jaminan terhadap POW. Untuk mendorong ekspor, pemerintah Thailand memberikan bantuan kepada para eksportir komoditas pertanian, khususnya beras, dalam bentuk subsidi kredit ekspor. Selain itu, pemerintah Thailand juga mengupayakan perdagangan bilateral dengan mekanisme timbal balik (*counter trade*), seperti yang sudah dilaksanakan dengan Indonesia, Philipina dan Irak.

Vietnam

Dari negara yang sangat kekurangan pangan, khususnya beras, dan pengimpor utama beras pada tahun delapan puluhan yang lalu, Vietnam telah mampu membalikkan keadaan menjadi negara pengekspor beras terbesar kedua di kawasan Asean setelah Thailand (Mohsin, 2002). Keberhasilannya dalam memasuki pasar dunia telah mendorong pengambil kebijakan menyusun suatu kebijakan baru dalam perdagangan, yaitu menyeimbangkan pasokan beras untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dengan harga yang terjangkau dengan upaya peningkatan pendapatan negara melalui ekspor beras. Secara garis besar kebijakan perberasan yang diterapkan pemerintah Vietnam, terdiri atas kebijakan umum dan khusus. Kebijakan umum antara lain: (a) cadangan pangan untuk menjaga kestabilan sosial dan politik, sehingga kegiatan pembangunan termasuk kegiatan usahatani padi dapat dilaksanakan dengan baik, (b) rehabilitasi dan pengembangan jaringan irigasi termasuk membuat bendungan untuk mengendalikan banjir, khususnya di Delta Sungai Mekong dan Delta Sungai Merah, dan (c) pengembangan varietas unggul padi. Untuk mendukung program ini Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam telah memperkenalkan kurang lebih

50 jenis varietas bibit padi baru. Kebijakan khusus yang dibuat pemerintah Vietnam antara lain: (a) sejak tahun 2001 pemerintah menyediakan lahan pertanian yang dapat digunakan petani dan masyarakat miskin tanpa dibebani sewa tanah, (b) pemerintah menjamin tingkat keuntungan tertentu petani padi dengan membeli semua beras yang dijual di pasar jika harga jatuh, dan (c) sejak tahun 2001 untuk mendukung petani dan pedagang padi/beras, pemerintah Vietnam membuat kebijakan pemberian subsidi bunga pinjaman.

Indonesia

Sebelum tahun 1998, kebijakan perberasan Indonesia cukup protektif dan pro petani. Pada saat itu, instrumen kebijakan perberasan nasional dapat digolongkan ke dalam dua tingkatan, yaitu tingkat usahatani dan tingkat pasar/konsumen. Di tingkat usahatani, kebijakan yang terpenting adalah berupa subsidi harga output (harga dasar), subsidi harga input (pupuk, benih dan pestisida) dan subsidi bunga kredit usahatani. Di tingkat pasar, kebijakan yang dilaksanakan berupa manajemen stok dan monopoli impor beras oleh Bulog, penyediaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) untuk operasional pengadaan beras oleh Bulog, Kredit Pengadaan Pangan bagi Koperasi/KUD, dan operasi pasar oleh Bulog pada saat harga beras tinggi. Sejak tahun 1998, kebijakan perberasan Indonesia mengalami perubahan drastis, dimana seluruh instrumen pendukung kecuali harga dasar telah dihapus oleh pemerintah. Penghapusan instrumen pendukung kebijakan perberasan nasional menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling liberal dalam perdagangan berasnya. Untuk memperbaiki kembali kebijakan perberasan nasional, pemerintah Indonesia melalui Inpres No.9 tahun 2001 tentang penetapan kebijakan perberasan telah menetapkan kebijakan perberasan secara komprehensif. Isi Inpres tersebut antara lain: (a) memberikan dukungan bagi peningkatan produktivitas petani padi dan produksi beras nasional, (b) memberikan dukungan diversifikasi bagi kegiatan ekonomi padi dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, (c) melaksanakan kebijakan harga dasar pembelian (HDP) oleh Bulog, yang sekarang menjadi Harga Pembelian Pemerintah (HPP), (d) menetapkan kebijakan impor beras dalam rangka memberi-

kan perlindungan kepada petani dan konsumen melalui evaluasi besaran tarif impor yang ditetapkan secara berkala, dan (e) memberikan jaminan bagi penyediaan dan penyaluran beras bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan. Sejalan dengan upaya peningkatan produksi beras domestik, berbagai bentuk kebijakan operasional pada aspek distribusi dan konsumsi juga diimplementasikan (Suryana, 2007), seperti intervensi sistem distribusi beras untuk meningkatkan keseimbangan distribusi antar waktu (*time*) dan antar wilayah (*spacial*) serta menjamin alokasi beras bagi rakyat miskin dengan harga subsidi (*raskin*) melalui pengelolaan cadangan dan distribusi pangan pemerintah.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Berbagai langkah dan kebijakan serta pembangunan infrastruktur mendukung peningkatan produksi padi telah dilakukan oleh negara-negara Asia dalam memperkuat kemandirian pangannya. Dalam kenyataannya, tidak semua negara-negara Asia mampu memenuhi kebutuhan permintaan berasnya secara memuaskan, baik karena kurangnya dukungan sumber daya lahan maupun belum intensifnya penerapan teknologi usahatani.

Kamboja mempunyai daya dukung sumber daya lahan pertanian relatif paling baik dalam penyediaan pangan beras bagi penduduknya dibandingkan negara-negara lain Asia, sementara paling lemah adalah Myanmar. Indonesia termasuk negara yang mempunyai daya dukung lahan pertanian kurang baik dalam penyediaan beras bagi penduduknya.

Dengan luas garapan hanya sebesar 0,13 ha per petani, petani Indonesia tidak mempunyai komparatif ekonomi jika mengandalkan sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya hanya dari usahatani padi. Sebaliknya petani di Malaysia dengan luas garapan 4,3 ha per petani, sudah mampu menghidupi keluarganya secara layak dengan hanya mengandalkan pendapatan dari usahatani padi.

Tingkat penerapan teknologi padi di kawasan Asia relatif paling intensif dilakukan petani-petani di China, sementara paling rendah di Pakistan. Petani Indonesia termasuk yang juga telah menerapkan teknologi usaha-

tani padi secara baik, hal ini salah satunya terbukti dari produktivitas padi di Indonesia yang menduduki urutan ke 5 di antara negara-negara Asia.

Selama tahun 2005-2006, terdapat enam negara di Asia, yaitu Kamboja, India, Korea, Myanmar, Pakistan, dan Thailand mempunyai kemandirian pangan cukup kuat. Keenam negara tersebut mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan berasnya dari produksi sendiri. Indonesia mempunyai tingkat kemandirian pangan beras relatif lebih baik dibanding Nepal, Jepang, Philipina, dan Malaysia, sekalipun pada waktu itu Indonesia merupakan pengimpor utama beras di Asia.

Upaya peningkatan produksi beras di Indonesia perlu terus diupayakan dalam mengatasi permintaan beras yang terus meningkat, baik melalui peningkatan luas tanam maupun produktivitas. Peningkatan luas tanam dapat dilakukan dengan mengendalikan konversi lahan pertanian ke penggunaan nonpertanian dan pembukaan lahan baru, serta adanya jaminan ketersediaan air di tingkat lahan petani agar indeks pertanaman padi bisa ditingkatkan. Peningkatan produktivitas dapat dilakukan melalui penciptaan teknologi sesuai kebutuhan petani dan penerapan teknologi secara baik. Untuk itu, aspek diseminasi mempunyai peranan sangat penting dalam percepatan adopsi inovasi teknologi di petani, seperti yang telah dilakukan melalui kegiatan Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi Teknologi (Prima Tani) maupun melalui forum peneliti-penyuluh-petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Bangladesh Government. 2007. Country Report of Rice in Bangladesh. Paper is Presented at 11th Annual Meeting Council for Partnership on Rice Research in Asia (CORRA), September, 2-5 September 2007. Hanoi, Vietnam.
- Cambodia Government. 2007. Country Report of Rice in Cambodia. Paper is Presented at 11th Annual Meeting Council for Partnership on Rice Research in Asia (CORRA), September, 2-5 September 2007. Hanoi, Vietnam.
- China Government. 2007. Country Report of Rice in China. Paper is Presented at 11th Annual

- Meeting Council for Partnership on Rice Research in Asia (CORRA), September, 2-5 September 2007. Hanoi, Vietnam.
- India Government. 2007. Country Report of Rice in India. Paper is Presented at 11th Annual Meeting Council for Partnership on Rice Research in Asia (CORRA), September, 2-5 September 2007. Hanoi, Vietnam.
- Japan Government. 2007. Country Report of Rice in Japan. Paper is Presented at 11th Annual Meeting Council for Partnership on Rice Research in Asia (CORRA), September, 2-5 September 2007. Hanoi, Vietnam.
- Kasryno F., A.M. Fagi, dan E. Pasandaran. 2004. Kebijakan Produksi Padi dan Diversifikasi Pertanian *dalam* Ekonomi Padi dan Beras Indonesia. Badan Litbang Pertanian-Dapartemen Pertanian. Jakarta.
- Kompas. 26 April 2008. Kebutuhan World Food Program (WFP) Naik: Dampak Kenaikan Harga Beras Berbeda *dalam* Kompas tanggal 26 April 2008, halaman 11. Jakarta.
- Kompas. 4 Mei 2008. Asean Sepakat Stabilisasi Harga *dalam* Kompas tanggal 4 Mei 2008, halaman 15. Jakarta.
- Korea Government. 2007. Country Report of Rice in Korea. Paper is Presented at 11th Annual Meeting Council for Partnership on Rice Research in Asia (CORRA), September, 2-5 September 2007. Hanoi, Vietnam.
- Koro N. M. 2002. Perkembangan dan Kebijakan Ekonomi Beras di Myanmar *dalam* Kebijakan Perberasan di Asia. Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan. Jakarta.
- Kustia A.A. 2002. Perkembangan dan Kebijakan Ekonomi Beras di Republik Rakyat China *dalam* Kebijakan Perberasan di Asia. Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan. Jakarta.
- Malaysia Government. 2007. Country Report of Rice in Malaysia. Paper is Presented at 11th Annual Meeting Council for Partnership on Rice Research in Asia (CORRA), September, 2-5 September 2007. Hanoi, Vietnam.
- Mohsin A. 2002. Perkembangan dan Kebijakan Ekonomi Beras di Vietnam *dalam* Kebijakan Perberasan di Asia. Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan. Jakarta.
- Myanmar Government. 2007. Country Report of Rice in Myanmar. Paper is Presented at 11th Annual Meeting Council for Partnership on Rice Research in Asia (CORRA), September, 2-5 September 2007. Hanoi, Vietnam.
- Nasution N. 2002. Perkembangan dan Kebijakan Ekonomi Beras di Kamboja *dalam* Kebijakan Perberasan di Asia. Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan. Jakarta.
- Nepal Government. 2007. Country Report of Rice in Nepal. Paper is Presented at 11th Annual Meeting Council for Partnership on Rice Research in Asia (CORRA), September, 2-5 September 2007. Hanoi, Vietnam.
- Pakistan Government. 2007. Country Report of Rice in Pakistan. Paper is Presented at 11th Annual Meeting Council for Partnership on Rice Research in Asia (CORRA), September, 2-5 September 2007. Hanoi, Vietnam.
- Pambundy, R., T.E.H. Basuki, dan S. Mardianto. 2002. Resume Pertemuan Kinerja Perberasan di Asia. Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan. Jakarta.
- Philippines Government. 2007. Country Report of Rice in Philippines. Paper is Presented at 11th Annual Meeting Council for Partnership on Rice Research in Asia (CORRA), September, 2-5 September 2007. Hanoi, Vietnam.
- Razif A.B. 2002. Perkembangan dan Kebijakan Ekonomi Beras di Laos *dalam* Kebijakan Perberasan di Asia. Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan. Jakarta.
- Saleim H. 2001. Kajian Pola Konsumsi dan Permintaan Pangan di Kawasan Timur Indonesia. Disertasi tidak dipublikasikan. Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Sawit M.H. 2001. Kebijakan Harga Beras: Periode Orba dan Reformasi *dalam* Bungai Rampai Ekonomi Beras. LPEM-UI Press. Jakarta.
- Simatupang P., dan W. Rusastra. 2004. Kebijakan Pembangunan Sistem Agribisnis Padi *dalam* Ekonomi Padi dan Beras Indonesia. Badan Litbang Pertanian-Dapartemen Pertanian. Jakarta
- Soemintaatmadja Z. 2002. Perkembangan dan Kebijakan Ekonomi Beras di India *dalam* Kebijakan Perberasan di Asia. Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan. Jakarta.
- Soeratmin. 2002. Perkembangan dan Kebijakan Ekonomi Beras di Filipina *dalam* Kebijakan Perberasan di Asia. Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan. Jakarta.
- Sri Lanka Government. 2007. Country Report of Rice in Sri Lanka. Paper is Presented at 11th Annual Meeting Council for Partnership on Rice Research in Asia (CORRA), September, 2-5 September 2007. Hanoi, Vietnam.

- Suryana A. 2007b. Menelistik Upaya Menggapai Ketahanan Pangan Nasional. Badan Litbang Pertanian. Jakarta.
- Suryana A., S. Mardianto, dan M. Ikhsan. 2001. Dinamika Kebijakan Perberasan Nasional: Sebuah Pengantar *dalam* Bungai Rampai Ekonomi Beras. LPEM-UI Press. Jakarta.
- Suryana. 2002. Bingkai Diskusi: Pengelolaan Kebijakan Perberasan di Asia. Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan. Jakarta.
- Suryana. 2007a. Country Report of Rice in Indonesia. Paper is Presented at 11th Annual Meeting Council for Partnership on Rice Research in Asia (CORRA), September, 2-5 September 2007. Hanoi, Vietnam.
- Thailand Government. 2007. Country Report of Rice in Thailand. Paper is Presented at 11th Annual Meeting Council for Partnership on Rice Research in Asia (CORRA), September, 2-5 September 2007. Hanoi, Vietnam.
- Utomo R. B. 2002. Perkembangan dan Kebijakan Ekonomi Beras di Thailand *dalam* Kebijakan Perberasan di Asia. Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan. Jakarta.
- Vietnam Government. 2007. Country Report of Rice in Vietnam. Paper is presented at 11th Annual Meeting Council for Partnership on Rice Research in Asia (CORRA), September, 2-5 September 2007. Hanoi, Vietnam.

Lampiran 1. Keragaan Daya Dukung Sumber Daya Lahan Pertanian, Produksi dan Produktivitas Padi di Negara-Negara Asia, 2005-2006

Negara	A	B	C	D	E	F	G
1. Korea	0,54	0,04	0,020	0,28	5,00	5,29	99,00
2. Malaysia	0,52	0,19	0,026	4,28	1,47	3,43	59,00
3. Thailand	0,47	0,32	0,156	0,62	29,59	2,92	15,00
4. Indonesia	0,40	0,24	0,051	0,13	54,45	4,62	61,75
5. Philipina	0,36	0,14	0,048	2,08	15,33	3,68	68,00
6. Kamboja	0,23	0,19	0,171	0,22	5,76	2,40	15,00
7. Pakistan	0,22	0,15	0,017	1,62	5,60	2,20	100,00
8. India	0,17	0,12	0,038	0,17	140,08	3,23	45,30
9. Vietnam	0,17	0,11	0,088	Na	36,00	4,88	80,00
10. China	0,16	0,12	0,022	Na	180,60	6,26	93,00
11. Nepal	0,15	0,13	0,060	0,44	4,21	2,72	51,22
12. Banglades	0,13	0,10	0,077	0,60	26,87	2,50	56,00
13. Sri Lanka	0,12	0,08	0,034	0,09	3,34	4,14	71,40
14. Jepang	0,07	0,03	0,013	1,60	8,55	5,07	88,80
15. Myanmar	0,01	0,01	0,002	0,04	32,51	3,83	20,00
Rataan	0,25	0,13	0,055	0,94	549,36	3,81	61,56

Keterangan: A = Keragaan rasio luas lahan pertanian terhadap penduduk desa di negara-negara Asia (ha/orang), Indonesia menduduki posisi ke 4

B = Keragaan rasio luas lahan pertanian terhadap total penduduk di negara-negara di Asia (ha/orang), Indonesia menduduki posisi ke 2

C = Keragaan rasio luas lahan padi terhadap total penduduk di negara-negara di Asia (ha/orang), Indonesia menduduki posisi ke 6

D = Keragaan rasio luas lahan padi terhadap petani padi di negara-negara di Asia (ha/orang), Indonesia menduduki posisi ke 11

E = Keragaan produksi padi di negara-negara di Asia (juta ton), Indonesia menduduki posisi ke 3

F = Keragaan tingkat produktivitas padi di negara-negara di Asia (ton/ha), Indonesia menduduki posisi ke 5

G = Keragaan luas sawah irigasi terhadap total luas sawah (%)

* = Total produksi padi

Sumber: Country Report dari 15 negara Asia, 2005-2006, pada pertemuan CORRA-IRRI, 2007, diolah

Lampiran 2. Keragaan Neraca Perdagangan Beras dari Negara-Negara Asia, 2005-2006

Negara	Ekspor (ribu ton)	Impor (ribu ton)	Surplus/Defisit (ribu ton)	Rasio Import hp Produksi Domestik (%)
1. Thailand	7.420,0 (35,45)	1,4 (0,02)	7.418,6	0,0
2. Vietnam	4.800,0 (22,93)	300,0 (4,78)	4.500,0	0,8
3. India	4.080,0 (19,49)	0 (0,00)	4.080,0	0,0
4. Pakistan	3.700,0 (17,68)	0 (0,00)	3.700,0	0,0
5. China	671,8 (3,21)	514,2 (8,19)	157,6	0,3
6. Myanmar	182,0 (0,87)	0 (0,00)	182,0	0,0
7. Sri Lanka	50,0 (0,24)	12,0 (0,19)	38,0	0,4
8. Jepang	22,5 (0,11)	606,6 (9,66)	-584,1	7,1
9. Malaysia	4,4 (0,02)	527,5 (8,40)	-523,2	36,0
10. Philipina	0,7 (0,00)	1729,2 (27,53)	-1.728,6	11,3
11. Banglades	0 (0,00)	532,0 (8,47)	-532,0	2,0
12. Kamboja	0 (0,00)	0 (0,00)	0	0,0
13. Indonesia	0 (0,00)	1900,0 (30,25)	-1.900,0	3,5
14. Korea	0 (0,00)	0,2 (0,00)	-0,2	0,0
15. Nepal	0 (0,00)	157,9 (2,51)	-157,9	3,8
Total	20.931,3 (100,00)	6.281,0 (100,00)	14.650,3	

Keterangan: Angka dalam kurung menunjukkan masing-masing persentase terhadap total ekspor dan impor beras Asia, Indonesia menduduki importir utama di Asia

Sumber: Country Report dari 15 negara Asia, 2005-2006, pada pertemuan CORRA-IRRI, 2007, diolah